PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Etika Politik Sebagai Fondasi Kewarganegaraan Demokratis

Dr. Saryono, S.Pd. M.Pd
Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Etika Politik Sebagai Fondasi Kewarganegaraan Demokratis

Dr. Saryono, S.Pd. M.Pd
Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.

Penerbit widina

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(ETIKA POLITIK SEBAGAI FONDASI KEWARGAAN DEMOKRATIS)

Tim Penulis:
Dr. Saryono, S.Pd. M.Pd
Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Proofreader:
Aas Masruroh

ISBN:
978-634-317-246-8

Cetakan Pertama:
September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari sebuah pertanyaan yang terus mengikuti penulis sepanjang perjalanan sebagai pendidik, mengapa pengetahuan tentang kewarganegaraan tidak selalu melahirkan kebijaksanaan dalam berkewargaan? Pertanyaan itu tidak muncul dari ruang seminar atau perdebatan akademik semata, melainkan tumbuh perlahan melalui pengalaman mengajar, berdialog dengan mahasiswa, mengamati dinamika masyarakat, serta menyaksikan perubahan cara manusia berinteraksi di ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Di ruang kelas, mahasiswa mampu menjelaskan demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, dan negara hukum dengan baik. Namun di luar kelas, perbedaan pendapat sering berubah menjadi permusuhan, kebebasan berbicara kerap kehilangan tanggung jawab, dan percakapan publik semakin miskin empati. Dari situlah muncul kesadaran bahwa persoalan kewargaan tidak cukup dijawab hanya dengan menambah pengetahuan, tetapi memerlukan pendalaman mengenai bagaimana manusia belajar hidup bersama.

Kesadaran tersebut membawa penulis pada keyakinan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada negara. Negara memang menjadi ruang tempat kewargaan dijalankan, tetapi kewargaan sendiri berakar pada relasi antarmanusia. Sebelum seseorang menjadi warga negara dalam pengertian konstitusional, ia terlebih dahulu adalah manusia yang hidup bersama manusia lain. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya bukan sekadar pendidikan mengenai institusi politik, melainkan pendidikan yang membantu manusia memahami makna kebebasan, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan kehidupan bersama. Perkembangan masyarakat kontemporer semakin memperlihatkan bahwa tantangan kewargaan tidak lagi semata-mata bersifat politik atau hukum, melainkan juga moral dan kultural. Kemajuan teknologi menghadirkan ruang publik yang semakin terbuka, tetapi tidak selalu diikuti oleh kemampuan berdialog. Informasi tersedia tanpa batas, tetapi tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Partisipasi menjadi semakin mudah, sementara refleksi justru sering tertinggal. Demokrasi menghadapi berbagai tantangan baru, seperti polarisasi, disinformasi, politik identitas, menurunnya kepercayaan publik, hingga kecenderungan melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai kekayaan kehidupan demokratis. Dalam konteks inilah Pendidikan

Kewarganegaraan dituntut untuk terus memperbarui orientasi dan cara pandangnya.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, buku *Pendidikan Kewarganegaraan Etika Politik sebagai Fondasi Kewargaan Demokratis* disusun sebagai sebuah perjalanan intelektual untuk memahami kembali makna kewargaan secara lebih utuh. Buku ini tidak dimaksudkan sekadar menyajikan konsep-konsep yang telah mapan, tetapi mengajak pembaca menelusuri pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang manusia, masyarakat, negara, demokrasi, pendidikan, dan kehidupan bersama. Setiap pembahasan berusaha menunjukkan bahwa kewargaan bukanlah sekadar status administratif ataupun identitas politik, melainkan cara manusia membangun relasi yang adil, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan sesamanya. Untuk itu, pembahasan disusun secara bertahap. Bagian pertama mengajak pembaca menelusuri landasan filosofis kewargaan melalui pembahasan mengenai hakikat manusia, masyarakat, negara, demokrasi, dan evolusi konsep kewarganegaraan. Bagian kedua menguraikan berbagai filsafat dan teori Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang dalam tradisi pemikiran dunia sebagai dasar memahami tujuan, orientasi, dan paradigma pendidikan kewargaan. Bagian ketiga menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia melalui pembahasan mengenai Pancasila, perkembangan PPKn, karakter warga negara Indonesia, serta dinamika kebangsaan yang terus berkembang. Bagian keempat kemudian mengarahkan perhatian pada dimensi pedagogis melalui pembahasan kurikulum, strategi pembelajaran, civic engagement, hingga tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di era digital dan kecerdasan buatan.

Seluruh perjalanan tersebut akhirnya bermuara pada bagian terakhir yang menjadi sintesis buku ini, yaitu Etika Politik sebagai Fondasi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia. Pada titik inilah penulis berusaha menunjukkan bahwa demokrasi tidak dapat bertahan hanya karena konstitusi, lembaga negara, ataupun prosedur politik. Semua itu memerlukan orientasi moral yang membimbing cara manusia menggunakan kebebasan, menjalankan kekuasaan, menghormati hukum, dan membangun kepercayaan dalam kehidupan bersama. Pendidikan Kewarganegaraan karena itu tidak cukup membentuk warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi harus menumbuhkan warga negara yang memiliki pertimbangan etis dalam setiap tindakan publiknya. Dengan demikian, etika politik dipahami bukan sebagai kajian politik praktis, melainkan sebagai fondasi filosofis bagi pembentukan kewargaan demokratis.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak mungkin menjawab seluruh persoalan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan masyarakat berlangsung jauh lebih cepat daripada kemampuan buku mana pun untuk mengikutinya. Namun justru karena itulah Pendidikan Kewarganegaraan harus terus dipahami sebagai bidang yang hidup, terbuka terhadap dialog, serta senantiasa berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa kehilangan pijakan moralnya. Buku ini diharapkan menjadi salah satu ruang dialog tersebut, ruang untuk berpikir kembali mengenai makna kewargaan dalam kehidupan demokratis Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, guru, peneliti, maupun pemerhati Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi siapa pun yang meyakini bahwa masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas institusi, melainkan terutama oleh kualitas manusia yang menghidupinya. Selama manusia masih belajar menghargai martabat sesamanya, mendengar sebelum menghakimi, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, Pendidikan Kewarganegaraan akan selalu memiliki relevansi. Sebab pada hakikatnya, Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar pendidikan tentang negara, melainkan pendidikan tentang bagaimana manusia belajar menjadi sesama dalam kehidupan yang demokratis.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAGIAN I LANDASAN FILOSOFIS KEWARGANEGARAAN **1**
BAB 1 MANUSIA, MASYARAKAT, DAN NEGARA **3**
A. Dari Komunitas Ke Masyarakat Politik 6
B. Kontrak Sosial Hobbes, Locke, dan Rousseau 9
C. Negara Modern dan Legitimasi Kekuasaan 12
D. Kelahiran Konsep Kewargaan (Citizenship) 16
BAB 2 EVOLUSI KONSEP KEWARGANEGARAAN **23**
A. Kewarganegaraan Klasik (Yunani–Romawi) 25
B. Kewarganegaraan Liberal (Hak Individu) 28
C. Kewarganegaraan Republikan (Kebajikan Publik) 32
D. Kewarganegaraan Sosial (T. H. Marshall) 35
E. Kewarganegaraan Multikultural 38
F. Kewarganegaraan Global dan Kosmopolitan 41
G. Kewarganegaraan Digital 44
BAB 3 DEMOKRASI, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA **49**
A. Demokrasi dan Partisipasi Publik 51
B. Hak Asasi Manusia dan Kewargaan 54
C. Rule of Law dan Konstitusionalisme 57
D. Civic Virtue dan Tanggung Jawab Publik 60
E. Deliberative Democracy (Habermas) 63
F. Tantangan Demokrasi Modern 66

BAGIAN II FILSAFAT DAN TEORI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN **73**
BAB 4 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN **75**
A. Pendidikan dan Pembentukan Manusia 77
B. Civic Education Vs Citizenship Education 81
C. PKN Sebagai Pendidikan Politik, Moral, dan Sosial 84
D. PKN Indoktrinasi Atau Emansipasi? 87
E. Tujuan Normatif Pendidikan Kewarganegaraan 90
BAB 5 TEORI-TEORI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN **95**
A. Liberal Citizenship Education 97
B. Civic Republican Education 100
C. Critical Pedagogy (Paulo Freire) 102

D. Multicultural Citizenship (James A. Banks)..... 105
E. Global Citizenship Education (Osler & Starkey) 107
F. Democratic Education 110
G. Service-Learning dan Civic Engagement..... 112
BAB 6 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL 119
A. Unesco dan Global Citizenship Education (GCE) 121
B. ICCS dan Pengukuran Civic Competence 124
C. Praktik Pendidikan Kewarganegaraan di Finlandia 126
D. Praktik Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat 129
E. Praktik Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang dan Korea 131
F. Pelajaran Komparatif 134

BAGIAN III PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA..... 139
BAB 7 LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS PPKN INDONESIA 141
A. Pancasila Sebagai Filsafat Kewargaan 143
B. Konstitusi dan Warga Negara 147
C. Tujuan Pendidikan Nasional 149
D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 152
E. Pkn Dalam Sistem Pendidikan Nasional 155
BAB 8 SEJARAH PERKEMBANGAN PPKN DI INDONESIA..... 161
A. Civics Kolonial 163
B. Kewargaan Masa Kemerdekaan 165
C. Pmp Orde Baru 168
D. Ppkn Era Reformasi 171
E. Kurikulum 2013 – Kurikulum Merdeka 173
F. Pergeseran Orientasi (Ideologisasi - Demokratisasi) 176
BAB 9 NILAI DAN KARAKTER WARGA NEGARA INDONESIA..... 183
A. Civics Virtue Berbasis Pancasila 185
B. Pendidikan Karakter 189
C. Multikulturalisme Indonesia 192
D. Toleransi dan Kohesi Sosial 195
E. Anti-Korupsi dan Etika Publik 198
F. Kewargaan Digital Indonesia 201

BAGIAN IV PEDAGOGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN..... 207
BAB 10 KURIKULUM DAN MATERI PPKN 209
A. Struktur Kurikulum PKN..... 211
B. Profil Pelajar Pancasila 214
C. Kompetensi Kewargaan Knowledge, Skills, Disposition 217

D. Integrasi Lintas Mata Pelajaran 225
E. Penilaian Pembelajaran Kewargaan 230
BAB 11 MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.....241
A. Inquiry Civic Learning 243
B. Problem-Based Learning Dalam PPKN 251
C. Project Citizen Dalam Pendidikan Kewarganegaraan 260
D. Debate & Deliberation Dalam Pendidikan Kewarganegaraan 268
E. Service Learning Dalam Pendidikan Kewarganegaraan 277
F. Experiential Civic Learning Dalam Pendidikan Kewarganegaraan 285
G. Digital Civic Learning Dalam Pendidikan Kewarganegaraan 292
BAB 12 PARTISIPASI, CIVIC ENGAGEMENT, DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.....303
A. Sekolah Sebagai Laboratorium Demokrasi..... 306
B. Organisasi Siswa dan Praktik Demokrasi 308
C. Komunitas dan Gerakan Warga..... 312
D. Partisipasi Pemuda 315
E. Kewargaan Digital 318
F. Masa Depan Pendidikan Kewarganegaraan di Era AI dan Globalisasi 320

BAGIAN V REKONSTRUKSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA.....327
BAB 13 ETIKA POLITIK SEBAGAI FONDASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA.....329
A. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan Memerlukan Etika Politik? 331
B. Ideologi Negara Sebagai Orientasi Moral Pendidikan Kewarganegaraan 334
C. Negara dan Kekuasaan Sebagai Amanah Publik..... 337
D. Orientasi Politik Dalam Kehidupan Demokratis 340
E. Praktik Kekuasaan Sebagai Praktik Etis 343
F. Legitimasi Politik dan Kepercayaan Publik 345
G. Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia 349
DAFTAR PUSTAKA.....363
GLOSARIUM 369
INDEKS 377
PROFIL PENULIS.....381


manusia
hilai
hak
moral
pancasila
kodrat
akai
etika
martabat
eksistensialisme
alam
rasional
keadilaa
metafisika
ontnat
eksjansi
filsafat
pendidikan
tanggung jawab
kewajiban
kebebasan
integritas
rasio
BAGIAN I
LANDASAN
FILOSOFIS
KEWARGANEGARAAN
epistemologi
pengetahuan
pemikiran
kritis
konteks
realitas
objektif
kewrgaan
komunitas
masyarakat
masyarakat
relasi
solidaritas
partisipasi
kepentingan
bersama
kontrak sosial
keadaban
hukum alam
kekuasaan
negara
filsafat politik
demokrasi
negara
kebajikan virtue
liberalisme
komunitarianisme
keadilan sosial
manusia sebagai makhluk sosial

BAB 1

MANUSIA, MASYARAKAT, DAN NEGARA

Setiap pembahasan tentang Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya tidak dapat dimulai dari negara, hukum, atau konstitusi, melainkan dari manusia itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi dengan pertanyaan yang lebih mendasar yakni mengapa manusia membutuhkan kehidupan bersama yang diatur oleh norma dan institusi? Untuk menjawabnya, kita harus terlebih dahulu memahami hakikat manusia. Dalam tradisi filsafat politik klasik, manusia tidak pernah dipahami sebagai individu yang sepenuhnya otonom dan terpisah dari orang lain. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politikon*, makhluk yang secara kodrati hidup dalam komunitas politik (Aristotle, 1998). Pernyataan ini bukan sekadar pengamatan empiris bahwa manusia cenderung hidup berkelompok, melainkan penegasan ontologis bahwa manusia hanya dapat mengembangkan rasio, bahasa, dan keutamaan hidupnya melalui kehidupan bersama. Tanpa komunitas, manusia kehilangan medium untuk mengaktualisasikan potensinya sebagai makhluk berakal.

Pemahaman tersebut diperluas dalam pemikiran modern yang melihat bahwa identitas manusia terbentuk melalui relasi sosial. Manusia tidak hanya hidup berdampingan, tetapi saling bergantung. Bahasa, norma, bahkan kesadaran diri lahir melalui interaksi. Giddens (1984) menegaskan bahwa struktur sosial tidak berdiri di luar manusia, melainkan terbentuk dan direproduksi melalui praktik sosial manusia itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, tetapi jaringan relasi yang membentuk makna kehidupan bersama. Dalam perspektif ini, manusia tidak dapat dipahami sebagai makhluk yang lebih dahulu ada lalu kemudian membentuk masyarakat, sebaliknya, keberadaan manusia sebagai subjek sosial justru terbentuk melalui kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan sosial bukan sekadar kebutuhan praktis, tetapi kondisi eksistensial yang memungkinkan manusia memahami dirinya.

BAB 2

EVOLUSI KONSEP KEWARGANEGARAAN

Bab sebelumnya telah menunjukkan bahwa negara lahir dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara tertib dan adil. Manusia sebagai makhluk sosial dan moral membentuk komunitas politik, dan dari komunitas politik itulah muncul negara modern beserta legitimasi kekuasaannya. Namun pembahasan tersebut baru menjelaskan mengapa manusia membutuhkan negara. Ia belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang lebih konkret seperti *ketika negara telah terbentuk, apa arti menjadi anggota dari negara itu?* Dengan kata lain, *bagaimana posisi individu di dalam komunitas politik dipahami dan dimaknai?* Pertanyaan inilah yang membawa kita pada konsep kewarganegaraan (*citizenship*). Kewarganegaraan bukan konsep yang tunggal dan tetap. Ia merupakan gagasan yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Dalam setiap periode sejarah, manusia memahami hubungan antara individu dan komunitas politik secara berbeda. Karena itu, kewarganegaraan tidak dapat dipahami hanya sebagai status hukum yang diberikan oleh negara. Ia merupakan konstruksi normatif yang mencerminkan pandangan suatu masyarakat tentang kebebasan, kewajiban, partisipasi, dan keadilan. Evolusi konsep kewarganegaraan akan menunjukkan bagaimana masyarakat menjawab pertanyaan *apa yang harus dimiliki seseorang agar diakui sebagai anggota penuh komunitas politik?*

Pada masa awal, kewarganegaraan dipahami sebagai partisipasi langsung dalam kehidupan publik. Dalam tradisi Yunani-Romawi, kewargaan berkaitan erat dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan kepentingan bersama. Warga negara adalah mereka yang hadir dalam ruang publik dan mengambil bagian dalam urusan kolektif. Akan tetapi, perubahan sosial, ekonomi, dan politik kemudian mengubah makna tersebut. Masyarakat modern yang luas dan kompleks tidak lagi memungkinkan partisipasi langsung sebagai satu-satunya dasar kewargaan. Kewarganegaraan kemudian berkembang menjadi hubungan

BAB 3

DEMOKRASI, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA

Bab sebelumnya telah menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan konsep yang berkembang dari waktu ke waktu. Menjadi warga negara tidak lagi hanya berarti memiliki status hukum dalam suatu negara, tetapi juga mencakup hak, partisipasi, solidaritas sosial, pengakuan identitas, kesadaran global, dan tanggung jawab dalam ruang digital. Namun seluruh dimensi tersebut belum dapat dipahami sepenuhnya tanpa melihat kerangka politik tempat kewarganegaraan dijalankan. Kewargaan bukanlah praktik yang berdiri sendiri, ia selalu berlangsung dalam suatu sistem pemerintahan. Sistem yang paling memungkinkan praktik kewargaan berkembang adalah demokrasi. Demokrasi memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam masyarakat non-demokratis, warga mungkin memiliki kewajiban kepada negara, tetapi tidak memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan. Sebaliknya, dalam masyarakat demokratis, warga tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga ikut membentuknya. Dahl (1998), menjelaskan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah sistem di mana warga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif. Partisipasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui kebebasan berpendapat, organisasi masyarakat, dan diskusi publik. Oleh karena itu, demokrasi bukan sekadar bentuk pemerintahan, melainkan cara mengatur hubungan antara warga dan kekuasaan. Dalam konteks ini, kewarganegaraan memperoleh maknanya yang konkret. Hak politik, kebebasan sipil, dan tanggung jawab sosial hanya dapat dijalankan apabila terdapat ruang partisipasi. Demokrasi memungkinkan warga menggunakan kebebasannya secara publik, sekaligus mengikat mereka dalam aturan bersama. Rawls (1993), menekankan bahwa masyarakat demokratis memerlukan prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua warga yang


BAGIAN II
FILSAFAT
DAN TEORI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
hak dan kewajiban
nilai
perkembangan moral
nilai
pembelajaran
filsafat
pendidikan
pendidikan
teori
tujuan pendidikan
kompetausi kewarganegaraan
karakter
progresivisme
kurikulum
eksistensialisme
rekonstruksionisme
esensialisme
perenialisme
teori pendidikan
pendekatan
pedagogi kritis
pembentukan warga negara
pendidikan nilai
berpikir kritis
partisipasi
idealisme
realisme
konstruktivisme
humanisme
teori belajar
kewargaan
demokrasi
kebebasan
keadilan
tanggung jawab
solidaritas
musyawarah
integritas
warga negara
etika
moral
sosial
budaya
konstruktivisme sosial
pembelajaran bermakna
pendidikan demokratis
paulo freire
john dewey
teori perkembangan moral
ki hadjar dewantara
lawrence kohlberg
pembelajaran reflektif
literasi kewarganegaraan
kontekstual
aktif
pembelajaran kolaboratif
pendidikan untuk demokrasi

BAB 4

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pembahasan dalam tiga bab sebelumnya menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh konstitusi, lembaga politik, atau prosedur pemilihan umum. Demokrasi pada akhirnya bergantung pada kualitas warganya. Hak asasi manusia, *rule of law*, partisipasi publik, hingga deliberasi rasional hanya dapat berjalan apabila warga memiliki kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam kehidupan bersama. Dengan demikian muncul pertanyaan yang lebih mendasar *apakah kualitas kewargaan itu dapat muncul dengan sendirinya? Ataukah ia harus dibentuk secara sadar melalui pendidikan?* Negara modern hampir selalu menjawab pertanyaan tersebut dengan satu kesimpulan kewargaan tidak lahir secara alamiah, melainkan dipelajari. Manusia memang lahir sebagai anggota masyarakat, tetapi tidak otomatis menjadi warga negara dalam arti politik dan moral. Ia harus belajar memahami hukum, menghargai perbedaan, menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab, serta berpartisipasi dalam kehidupan publik. Di sinilah Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh kedudukannya. Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar mata pelajaran, melainkan proses sosial di mana masyarakat mentransmisikan nilai, norma, dan pengetahuan yang memungkinkan kehidupan demokratis berlangsung.

John Dewey (1916), melihat pendidikan sebagai proses pembentukan pengalaman sosial. Menurutnya, demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi cara hidup bersama (*a way of life*). Karena itu demokrasi memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan, warga tidak memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Sekolah menjadi ruang penting tempat individu belajar hidup sebagai anggota komunitas. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk disposisi demokratis. Dalam perspektif ini, Pendidikan Kewarganegaraan muncul sebagai jembatan antara teori politik dan praktik sosial. Negara tidak cukup

BAB 5

TEORI-TEORI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Jika bab sebelumnya membahas hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dari sudut filsafat seperti mengapa negara perlu mendidik warganya, maka bab ini bergerak ke wilayah teori tentang bagaimana warga seharusnya dididik menurut berbagai tradisi pemikiran. Pendidikan kewargaan tidak berkembang dalam satu jalur intelektual yang tunggal. Ia lahir dari perjumpaan berbagai teori politik, filsafat moral, dan teori pendidikan. Karena itu memahami Pendidikan Kewarganegaraan berarti juga memahami perbedaan cara para pemikir memandang manusia, masyarakat, dan demokrasi. Perbedaan tersebut penting karena konsep kewargaan sendiri bukan konsep yang netral. Setiap teori kewargaan mengandung asumsi tentang manusia. *Apakah manusia dipandang terutama sebagai individu otonom, anggota komunitas, atau bagian dari struktur sosial yang tidak setara?* Jawaban atas pertanyaan ini menentukan bentuk pendidikan kewargaan. Jika manusia dipandang sebagai individu rasional, pendidikan akan menekankan kebebasan dan hak. Jika manusia dipandang sebagai anggota komunitas, pendidikan akan menekankan kebajikan publik dan tanggung jawab bersama. Jika manusia dipandang berada dalam relasi kuasa yang tidak setara, pendidikan akan menekankan kesadaran kritis dan emansipasi. Dengan demikian teori Pendidikan Kewarganegaraan selalu berakar pada teori politik dan teori sosial.

Selama abad ke-20 dan awal abad ke-21, berbagai model pendidikan kewargaan berkembang di berbagai belahan dunia. Tradisi liberal menekankan hak individu dan otonomi pribadi, tradisi republikan menekankan partisipasi dan kebajikan publik, pendekatan pedagogi kritis melihat pendidikan kewargaan sebagai sarana pembebasan dari ketidakadilan sosial, pendekatan multikultural menekankan pengakuan identitas dan inklusi, sementara pendekatan global menghubungkan

BAB 6

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Setelah bab sebelumnya memetakan teori-teori utama Pendidikan Kewarganegaraan, pertanyaan berikutnya muncul secara alami, *bagaimana teori-teori tersebut diwujudkan dalam praktik pendidikan di dunia nyata?* Pendidikan kewargaan bukan hanya wacana filosofis atau perdebatan konseptual, melainkan bidang kebijakan pendidikan global yang secara aktif dikembangkan oleh organisasi internasional, lembaga penelitian pendidikan, dan sistem pendidikan berbagai negara. Oleh karena itu, untuk memahami Pendidikan Kewarganegaraan secara utuh, pembahasan harus bergerak dari wilayah teori menuju wilayah praktik komparatif. Sejak akhir abad ke-20, Pendidikan Kewarganegaraan semakin dipandang sebagai kebutuhan global. Perubahan sosial yang cepat seperti globalisasi ekonomi, migrasi lintas negara, perkembangan teknologi komunikasi, serta meningkatnya kompleksitas politik membuat negara-negara menyadari bahwa keberlangsungan demokrasi tidak dapat bergantung hanya pada institusi politik. Demokrasi membutuhkan warga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewargaan. Dalam konteks inilah pendidikan kewargaan menjadi perhatian organisasi internasional. UNESCO, OECD, dan *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA) tidak lagi melihat kewargaan sebagai persoalan domestik semata, tetapi sebagai kompetensi yang harus dikembangkan secara sistematis melalui pendidikan.

UNESCO, misalnya, mengembangkan kerangka *Global Citizenship Education* (GCE) yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan kesadaran kemanusiaan global (UNESCO, 2015). Pendidikan tidak hanya mempersiapkan individu untuk kehidupan ekonomi, tetapi juga untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Kerangka tersebut kemudian diperkaya melalui agenda *Education for Sustainable Development*


sejarah
pkn
pembentukan karakter
identitas nasional
nilai-nilai Pancasila
kebangsaan
perjalanan
pendidikan nasional
kurikulum
perkembangan
kewargaan
BAGIAN III
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
DI
INDONESIA
sekolah
masa kolonial
masa kemerdekaan
orde lama
orde baru
reformasi
era digital
kontekstualisasi
nilai dan norma
tanggung jawab
pembelajaran
kompetensi
partisipasi
demokrasi
hak dan kewajiban
musyawarah
toleransi
keadilan
persatuan
integritas
gotong royong
budaya
kebijakan
pendekatan
metode
strategi
evaluasi
buku teks
guru
siswa
media
teknologi
pendidikan karakter
citizenship education
profil pelajar Pancasila
proyek penguatan profil pelajar Pancasila
penguatan pendidikan kewarganegaraan
masa depan

BAB 7

LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS PPKN INDONESIA

Jika pada bagian sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan dipahami melalui diskursus global seperti GCE UNESCO, pengukuran kompetensi kewargaan oleh ICCS, serta praktik di berbagai negara maka pembahasan kini bergerak pada pertanyaan *bagaimana konsep kewargaan tersebut memperoleh bentuk konkret dalam pengalaman Indonesia?* Setiap negara tidak sekadar mengadopsi teori kewargaan, melainkan menafsirkan dan menginstitusikannya melalui sejarah, nilai, dan sistem hukumnya sendiri. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan selalu merupakan pertemuan antara teori universal dan identitas kebangsaan.

Indonesia memiliki karakter yang berbeda dari banyak negara yang telah dibahas sebelumnya. Negara ini lahir bukan dari homogenitas etnis, bahasa, maupun agama, melainkan dari kesadaran politik bersama untuk hidup sebagai bangsa. Oleh karena itu, kewargaan Indonesia sejak awal tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka liberal (hak individu) ataupun republikan (kebajikan publik) semata. Ia memerlukan dasar filosofis yang mampu menjembatani pluralitas. Di sinilah Pancasila memperoleh maknanya. Pancasila bukan sekadar ideologi negara dalam pengertian politis, melainkan kerangka filsafat kewargaan yang mengatur relasi antara individu, masyarakat, dan negara (Notonagoro, 1975, Kaelan, 2013). Dalam pemikiran Pancasila, manusia tidak ditempatkan sebagai individu terisolasi, tetapi sebagai makhluk pribadi sekaligus sosial. Prinsip kemanusiaan menegaskan martabat individu, sementara prinsip persatuan menegaskan kehidupan kolektif. Keduanya tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan dalam kerangka keadilan sosial. Yudi Latif (2015), menyebut Pancasila sebagai sintesis antara kebebasan modern, religiositas, dan solidaritas sosial. Artinya, kewargaan Indonesia sejak awal merupakan proyek etis-politik

BAB 8

SEJARAH PERKEMBANGAN PPKN DI INDONESIA

Setelah membahas landasan filosofis dan yuridis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting muncul adalah *apakah PPKn sejak awal memang dirancang sebagai pendidikan demokrasi?* Pertanyaan ini krusial, karena kritik terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia hampir selalu bersumber dari sejarahnya sendiri. Dalam memori kolektif masyarakat, pendidikan kewargaan sering diasosiasikan dengan indoktrinasi politik. Oleh karena itu, untuk memahami posisi PPKn secara adil, pendekatan normatif tidak cukup tetapi diperlukan pendekatan historis.

Pendidikan, sebagaimana diingatkan H. A. R. Tilaar (2002), selalu berada dalam relasi dengan perubahan sosial. Ia tidak pernah berdiri netral di luar kekuasaan, melainkan berinteraksi dengan struktur politik dan ideologi yang melingkupinya. Sekolah bukan hanya institusi pedagogis, tetapi juga institusi sosial yang merefleksikan orientasi negara. Karena itu, perubahan sistem politik hampir selalu diikuti perubahan orientasi pendidikan. Dalam konteks ini, sejarah PPKn dapat dibaca sebagai cermin hubungan antara pendidikan dan kekuasaan di Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan kewargaan tidak dimaksudkan membentuk warga negara merdeka, melainkan membentuk subjek yang patuh terhadap pemerintahan kolonial. Apa yang disebut *civics* lebih merupakan pendidikan tata tertib administratif daripada pendidikan politik. Pendidikan diperuntukkan bagi pembentukan aparatur lokal yang loyal, bukan warga yang otonom. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewargaan sejak awal memang terkait erat dengan proyek politik suatu rezim.

Setelah kemerdekaan, orientasi tersebut berubah. Negara baru memerlukan integrasi nasional dan pembentukan identitas kolektif. Pendidikan kewargaan kemudian dipahami sebagai sarana *nation-building*.

BAB 9

NILAI DAN KARAKTER WARGA NEGARA INDONESIA

Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak berhenti pada persoalan struktur negara, konstitusi, maupun sistem politik. Seluruh kerangka tersebut pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan *manusia seperti apa yang hendak dibentuk oleh pendidikan kewargaan?* Demokrasi tidak pernah bertumpu hanya pada lembaga, tetapi pada kualitas manusia yang menghidupinya. Konstitusi dapat dirumuskan secara ideal, prosedur politik dapat dirancang secara rasional, namun tanpa karakter kewargaan yang memadai, seluruh perangkat tersebut tidak akan menghasilkan kehidupan publik yang berkeadaban.

Dalam filsafat politik klasik, masalah ini telah lama disadari. Aristoteles menempatkan *good citizen* sebagai prasyarat keberlangsungan polis, republik tidak dapat bertahan tanpa kebajikan warganya. Dalam konteks modern, persoalan serupa muncul kembali dalam teori demokrasi. Demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi disposisi moral seperti kesediaan untuk menghormati hukum, mengakui hak orang lain, dan membatasi diri demi kepentingan bersama. Dengan kata lain, demokrasi bukan hanya sistem institusional, melainkan praktik etis kehidupan publik. Di sinilah pendidikan kewargaan bertemu dengan pendidikan karakter. Lickona (1991), menegaskan bahwa pendidikan karakter bukan sekadar pengajaran nilai moral, tetapi pembentukan kebiasaan bertindak yang baik dalam kehidupan sosial. Berkowitz dan Bier (2005), menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif selalu berkaitan dengan pengalaman sosial nyata, bukan hanya pengajaran normatif. Nucci, Narvaez, dan Krettenauer (2014), bahkan menempatkan pendidikan moral sebagai inti dari pembentukan identitas sosial individu. Artinya, kewargaan tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter.


strategi pembelajaran
pendekatan
pembelajaran aktif
student centered
experiential learning
konstruktivisme
pembelajaran bermakna
reflektif
metode pembelajaran
kolaboratif
kooperatif
diskusi
studi kasus
problem based
project based
service learning
inkuiri
kontekstual
BAGIAN IV
PEDAGOGI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
pengembangan karakter
nilai Pancasila
moral
integritas
tanggung jawab
empati
toleransi
keadilan
gotong royong
nasionalisme
peran guru
fasilitator
teladan
inspirator
motivator
evaluasi
asesmen
formatif
sumatif
autentik
media pembelajaran
teknologi pendidikan
pemanfaatan TIK
literasi digital
sumber belajar
lingkungan belajar
asesmen autentik
penilaian sikap
pengetahuan
keterampilan
disposisi
partisipasi aktif
demokrasi di kelas
pembelajaran demokratis

BAB 10

KURIKULUM DAN MATERI PPKN

Bab-bab sebelumnya menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kerangka filosofis, teoritis, dan sosiologis. Kita telah melihat bahwa PKn bukan sekadar mata pelajaran yang menyampaikan informasi tentang negara, melainkan pendidikan pembentukan warga negara demokratis. Namun pada titik ini muncul pertanyaan yang tidak kalah penting yaitu *bagaimana gagasan normatif tersebut diwujudkan dalam praktik pendidikan?* Nilai, karakter, dan kompetensi kewargaan tidak akan terbentuk hanya melalui pernyataan tujuan. Ia harus diterjemahkan ke dalam kurikulum, materi, dan pengalaman belajar. Di sinilah persoalan pedagogis mulai mengambil peran sentral. Kurikulum pada dasarnya merupakan jembatan antara filsafat pendidikan dan praktik pembelajaran. Ia bukan sekadar daftar materi pelajaran, melainkan rancangan pengalaman belajar yang direncanakan secara sadar. Ralph Tyler (1949), menempatkan kurikulum sebagai proses rasional yang dimulai dari tujuan pendidikan, kemudian diterjemahkan ke dalam pengalaman belajar, organisasi pembelajaran, dan evaluasi. Artinya, kurikulum bukan kumpulan topik, tetapi sistem yang menghubungkan tujuan pendidikan dengan perkembangan peserta didik. Jika tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan warga demokratis, maka kurikulum harus dirancang untuk menghasilkan pengalaman kewargaan, bukan hanya pemahaman kognitif. Hilda Taba (1962), memperkuat gagasan tersebut dengan menekankan bahwa kurikulum harus disusun berdasarkan kebutuhan perkembangan peserta didik dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tidak dapat diajarkan secara abstrak dan terpisah dari realitas sosial. Materi pembelajaran harus berhubungan dengan kehidupan publik yang dihadapi siswa. Dengan demikian kurikulum PKn bukan sekadar pengajaran konstitusi, tetapi pembelajaran kehidupan demokratis. Peserta didik tidak hanya mempelajari negara sebagai objek pengetahuan, melainkan mengalami proses menjadi warga negara.

BAB 11

MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Jika bab sebelumnya membahas kurikulum sebagai kerangka normatif Pendidikan Kewarganegaraan, maka bab ini bergerak ke wilayah bagaimana kewargaan benar-benar dipelajari oleh siswa. Persoalan ini tidak sederhana, karena kewargaan bukanlah pengetahuan yang dapat ditransfer secara langsung dari guru kepada peserta didik. Ia adalah kualitas pengalaman. Seseorang tidak menjadi warga negara demokratis hanya karena mengetahui demokrasi, melainkan karena menjalani praktik hidup demokratis. Dengan demikian pertanyaan pedagogis utama muncul adalah *bagaimana pembelajaran dapat menghadirkan pengalaman kewargaan di dalam kelas?* Dalam tradisi pendidikan modern, model pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai teknik mengajar, tetapi sebagai cara memahami proses belajar manusia. Joyce, Weil, dan Calhoun (2015), menjelaskan bahwa model pembelajaran mencerminkan pandangan tentang bagaimana manusia berpikir, berinteraksi, dan membangun makna. Oleh karena itu pemilihan strategi pembelajaran dalam PPKn tidak bersifat metodologis semata, melainkan filosofis. Model pembelajaran menentukan bentuk warga negara yang mungkin terbentuk melalui pendidikan.

Pembelajaran kewargaan yang hanya menggunakan ceramah berangkat dari asumsi bahwa kewargaan adalah pengetahuan politik. Guru menjelaskan sistem pemerintahan, siswa mencatat, kemudian diuji melalui soal. Metode ini efektif untuk menyampaikan informasi, tetapi tidak cukup untuk membentuk kewargaan. Demokrasi bukan hanya sistem informasi, ia adalah praktik sosial yang membutuhkan interaksi, argumentasi, dan pertimbangan moral. Tanpa pengalaman tersebut, siswa memahami demokrasi secara kognitif tetapi tidak memiliki kapasitas demokratis. Penelitian pendidikan kontemporer menunjukkan bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa terlibat secara aktif dalam proses berpikir.

BAB 12

PARTISIPASI, *CIVIC ENGAGEMENT*, DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pada titik ini buku sampai pada pertanyaan *mengapa pendidikan kewarganegaraan tetap diperlukan?* Seluruh pembahasan sebelumnya tentang negara, demokrasi, nilai publik, kurikulum, hingga strategi pembelajaran pada akhirnya bermuara pada satu persoalan yakni apakah warga negara akan benar-benar berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Pendidikan kewarganegaraan tidak pernah menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Ia selalu berhubungan dengan kualitas kehidupan publik. Tanpa partisipasi warga, demokrasi hanya menjadi prosedur institusional, tanpa keterlibatan sosial hak kewargaan menjadi formalitas hukum. Dalam kajian sosial modern menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan yakni melemahnya ikatan sosial dan menurunnya partisipasi warga dalam kehidupan komunitas (Bowling Alone, 2000). Individu masih memiliki hak politik, tetapi semakin jarang terlibat dalam organisasi, diskusi publik, atau aktivitas komunitas. Demokrasi tetap berjalan, namun kehilangan energi sosialnya. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa masalah demokrasi kontemporer bukan hanya otoritarianisme, melainkan apati kewargaan. Warga negara tidak selalu ditindas, sering kali mereka justru tidak terlibat. Karena itu, persoalan utama Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar membentuk individu yang patuh hukum, tetapi membentuk individu yang mau mengambil bagian dalam kehidupan publik. *Civic engagement* menjadi inti pembahasan bab ini. Kewargaan tidak hanya status legal, melainkan praktik sosial yakni serangkaian tindakan yang menghubungkan individu dengan komunitas dan dengan dunia politik. Partisipasi warga, dalam pengertian ini, bukan hanya pemilu atau aktivitas politik formal, tetapi seluruh keterlibatan dalam kehidupan bersama.


visi kewarganegaraan
pancasila sebagai dasar dan orientasi
nilai-nilai Pancasila
etika politik
ideologi negara
demokrasi Pancasila
keadilan sosial
identitas nasional
integritas
keadilan sosial
manusia Indonesia seutuhnya
kebangsaan
persatuan
tanggung jawab
BAGIAN V
REKONSTRUKSI
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
paradigma baru
pembelajaran bermakna
kompetesi kewargaan
pengetahuan kewargaan
keterampilan kewargaan
disposisi kewargaan
partisipasi demokratis
berpikir kritis
peduli sosial
toleransi
musyawarah
gotong royong
integritas
kontekstual
inklusif
transformatif
partisipatif
berkelanjutan
kolaboratif
humanis
literasi digital
literasi informasi
literasi politik
literasi etika
civic disposition
warga digital
kewargaan global
civic resilience
keadaban publik
kearifan lokal
kurikulum PPKn kontekstual
strategi pembelajaran inovatif
asesmen autentik
proyek kewargaan
penguatan profil pelajar Pancasila
lingkungan belajar demokratis
sekolah sebagai komunitas kewargaan
kemitraan dan kolaborasi
pembelajaran sepanjang hayat
demokrasi deliberatif
kebijakan pendidikan kewarganegaraan
mewujudkan warga negara demokratis
untuk Indonesia masa depan

BAB 13

ETIKA POLITIK SEBAGAI FONDASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Seluruh pembahasan dalam buku ini berangkat dari keyakinan bahwa kehidupan kewargaan tidak pernah lahir dengan sendirinya. Menjadi warga negara bukan sekadar status hukum yang diberikan oleh negara, melainkan proses yang terus berlangsung ketika seseorang belajar hidup bersama dengan orang lain. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan sejak awal tidak hanya berbicara tentang negara, konstitusi, demokrasi, atau hak dan kewajiban warga negara. Seluruhnya merupakan jalan untuk memahami persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana manusia dapat hidup bersama secara adil, bermartabat, dan bertanggung jawab di tengah berbagai perbedaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Perjalanan itu membawa kita pada berbagai persoalan yang saling berkaitan. Negara dibentuk untuk menjaga kehidupan bersama, tetapi negara hanya akan bermakna apabila kekuasaan dijalankan demi kepentingan publik. Demokrasi memberi ruang bagi kebebasan dan partisipasi, tetapi kebebasan tidak selalu melahirkan tanggung jawab. Hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi, tetapi penghormatan terhadap hak belum tentu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, persoalan kewargaan tidak pernah berhenti pada bagaimana sistem politik dibangun, melainkan selalu kembali kepada bagaimana manusia menggunakan kebebasan, kekuasaan, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bersama. Di sinilah muncul pertanyaan yang tidak dapat dihindari. *Mengapa masyarakat yang memahami demokrasi masih dapat terjebak dalam polarisasi? Mengapa prosedur politik yang berjalan secara konstitusional tetap dapat melahirkan ketidakadilan? Mengapa warga negara yang mengetahui hak-haknya belum tentu bersedia memenuhi kewajibannya?*

DAFTAR PUSTAKA

Adams, C. (1965). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakjat Indonesia. Gunung Agung.

Anderson, B. (1983). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso.

Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.

Aristoteles. (2020). Etika Nikomakea (Firts). BASABASI.

Arthur, J., Davies, I., & Hahn, C. (2008). *The SAGE handbook of education for citizenship and democracy*. SAGE Publications Ltd, https://doi.org/10.4135/9781849200486

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Baidhawy, Z. (2005). Pendidikan agama berwawasan multikultural. Erlangga.

Banks, J. A. (2008). An introduction to multicultural education. Pearson.

Bauböck, R. (2010). Citizenship and migration. Amsterdam University Press.

Benhabib, S. (2004). *The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). What Works in Character Education: A Research-Driven Guide for Educators. Character Education Partnership.

Biesta, G. (01 Jan. 2011). Learning Democracy in School and Society. Leiden, The Netherlands: Brill. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-512-3

Billig, Shelley, "Research on K-12 School-Based Service-Learning: The Evidence Builds" (2000). *School K-12*. 3. https://digitalcommons.unomaha.edu/slcek12/3

Branson, M. S. (1999). Belajar “Civic Education” dari Amerika (Terjemahan Syarifudin dkk). Yogyakarta: LKIS.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia.

Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.

Calhoun, C. (2016). The Importance of Imagined Communities – and Benedict Anderson. Annual Review. Debats. Revista de Cultura, Poder i Societat, 1, 11–16. https://doi.org/10.28939/iam.debats-en.2016-1

Callan, E. (1997). *Creating citizens: Political education and liberal democracy*. Clarendon Press. https://doi.org/10.1093/0198292589.001.0001.

Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed., with a new preface, Vol. 1, *The Information Age: Economy, Society, and Culture*). Wiley-Blackwell..

Chan, J., To, H.-P., & Chan, E. (2006). Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. *Social Indicators Research, 75*(2), 273–302. https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1

Checkoway, B. (2011). What is youth participation? *Children and Youth Services Review, 33*(2), 340–345. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.09.017

Crick, B. (1998) Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools. Qualifications and Curriculum Authority.

Dahl, R. A. (1998). On democracy. Yale University Press.

Davies, I and J Issitt (2005). 'Reflections on citizenship education in Australia, Canada and England'. Comparative Education, 41 (4), 389–410.

Dewantara, K. H. (2004). Karya Ki Hajar Dewantara: Bagian I Pendidikan. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dewey, J (1916 [1966]) Democracy and Education. London: Collier-Macmillan

Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. Journal of Democracy, 26, 141-155. https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009

Durkheim, E. (1997). The Division of Labor in Society. NY: Free Press.

Edor, J. (2020). John Rawls's Concept of Justice as Fairness. PINISI Discretion Review, 4, 179. https://doi.org/10.26858/pdr.v4i1.16387

Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology. Human Affairs, 22(3), 283–300. 10.2478/s13374-012-0024-1

Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality. Oxford: OUP.

Fonseca, X., Lukosch, S., & Brazier, F. (2019). Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, *32*(2), 231–253. https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum Books.

Galston, W. A. (2001). Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education. *Annual Review of Political Science, 4,* 217-234. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217.

Giddens, A. (1984) The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. University of California Press, Berkeley.
Giroux, H. A. (2011). On critical pedagogy. Bloomsbury.
Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). Why deliberative democracy? Princeton University Press.
Habermas, J. (1996). Between facts and norms. MIT Press.
Hahn, C. (1998). Becoming political. SUNY Press.
Hall, E., & Sabl, A. (2022). Political Ethics: A Handbook. In Political Ethics: A Handbook.
Held, D. (2006). Models of democracy (3rd ed.). Stanford University Press.
Hess, D. (2009). Controversy in the classroom. Routledge.
Hess, D., & McAvoy, P. (2015). The political classroom. Routledge.
Hobbes, T. (1996). Leviathan. Cambridge University Press.
Hoskins, B., & Mascherini, M. (2009). Measuring civic competence. Social Indicators Research.
Ichilov, O. (2004). Political socialization, citizenship education and democracy. Teachers College Press.
Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). Handbook of citizenship studies. Sage.
Isin, E., & Ruppert, E. (2015). Being digital citizens. Rowman & Littlefield.
Jenkins, H. (2016). Participatory culture in a networked era. Polity.
Jenson, J. (1998). Mapping social cohesion. Canadian Policy Research Networks.
Johnson, L., & Morris, P. (2010). Towards a Framework for Critical Citizenship Education. Curriculum Journal, 21(1), 77–96.
Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). Models of teaching. Pearson.
Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). Educating for democracy in a partisan age. American Educational Research Journal.
Kearns, A., & Forrest, R. (2000). Social cohesion and multilevel urban governance. Urban Studies.
Kearns, A., & Forrest, R. (2000). Social Cohesion and Multilevel Urban Governance. Urban Studies, 37(5–6), 995–1017.
Kemdikbud. (2017). Penguatan pendidikan karakter.
Kemdikbud. (2021). Kurikulum Merdeka.
Kemdikbud. (2022). Profil Pelajar Pancasila.
Kerr, D. (1999). Citizenship education: An international comparison. NFER.
Kerr, D., & Cleaver, E. (2004). Citizenship education longitudinal study. DfES.
Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship. Oxford University Press.
Latif, Y. (2011). Negara paripurna. Gramedia.
Latif, Y. (2015). Revolusi Pancasila. Mizan.

Levinson, M. (2012). No citizen left behind. Harvard University Press.
Lickona, T. (1991). Educating for character. Bantam Books.
Locke, J. (1988). Locke: Two Treatises of Government. P. Laslett (Ed.), Cambridge: Cambridge University Press. (Original work published 1689). http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511810268.
Mahfud MD. (2017). Politik hukum di Indonesia. Rajawali Press.
Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge: Cambridge University Press.
Montesquieu (1989) The Spirit of the Laws. Cambridge University Press, Cambridge.
Mouffe, C. (2005). On the political. Routledge.
Newman, F. M., & Associates (1996). Authentic Achievement: Restructuring Schools for Intellectual Quality. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Notonagoro. (1975). Pancasila secara ilmiah populer. Bina Aksara.
Nucci, L. (2008). Handbook of Moral and Character Education. Handbook of Moral and Character Education. https://doi.org/10.4324/9780203931431.
OECD. (2011). Perspectives on global development 2012: Social cohesion in a shifting world. OECD Publishing.
OECD. (2018). Preparing Our Youth for an Inclusive and Sustainable World. OECD Publishing.
Ong, A. (2006). Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Durham: Duke University Press. http://dx.doi.org/10.1215/9780822387879
Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum Foundations, Principles, and Issues (4th ed.). Allyn & Bacon.
Osler, A., & Starkey, H. (2005). *Changing citizenship: Democracy and inclusion in education*. McGraw-Hill Education (UK).
Parker, P. (2003). Teaching Democracy: Unity and Diversity in Public Life. New York: Teachers' College.
Peters, R. S. (1966). Ethics and education. Allen & Unwin.
Pettit, P. (1997). *Republicanism: A theory of freedom and government*. Clarendon Press.
Pocock, John Greville Agard (ed.) (1975). The Machiavellian moment: Florentine political thought and the Atlantic republican tradition. [Princeton, N.J.]: Princeton University Press..
Print, M. (1993). Curriculum Development and Design (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003115328

Putnam, R.D. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster, New York. http://dx.doi.org/10.1145/358916.361990.
Rawls, J. (1993). Political liberalism. Columbia University Press.
Rawls, J. (1999). A Theory of Justice (Revisi. Ed). Harvard University Press.
Rheingold, H. (2012). Net Smart: How to Thrive Online. Cambridge, MA: The MIT Press.
Rosanvallon, P. (2008). Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust. Cambridge University Press.
Roth, G. (2023). Max Weber's vision of history: Ethics and methods. In Max Weber's Vision of History: Ethics and Methods. https://doi.org/10.2307/491711
Rousseau, J.-J. (2012). The social contract. Penguin Classics.
Sandel, M. J. (2009). Justice: What's the Right Thing to Do? Farrar, Straus and Giroux.
Schiefer, D., & van der Noll, J. (2017). The essentials of social cohesion. Social Indicators Research.
Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., & Agrusti, G. (2016). ICCS 2016 international report. IEA.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Soekarno. (2001). Risalah sidang BPUPKI dan PPKI (Pidato 1 Juni 1945). Sekretariat Negara RI.
Somantri, N. (2001). Menggagas pembaharuan pendidikan IPS. Remaja Rosdakarya.
Susen, S. (2018). Jürgen Habermas Between democratic deliberation and deliberative democracy. In B. Wodak, R. & Forchtner (Ed.), The Routledge Handbook of Language and Politics (pp. 43–66). Routledge.
Suyato, S. (2023). Engineering the development of democratic citizenship education curriculum in the global era: A few perspectives from theoretical frameworks. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 20(1), 26–35. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.59915
Taylor, C. (1994). Multiculturalism and the politics of recognition. Princeton University Press.
Tilaar, H. A. R. (2002). Perubahan sosial dan pendidikan. Grasindo.
Tilaar, H. A. R. (2009). Kekuasaan dan pendidikan. Rineka Cipta.
Torney-Purta, J., Barber, C., & Wilkenfeld, B. (2007). Latino adolescents' civic development in the United States: Research results from the IEA Civic Education Study. Journal of Youth and Adolescence, 36, 111-125.

Turner, B. S. (1993). Contemporary problems in the theory of citizenship. Citizenship Studies.
Tyler, R. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. University of Chicago Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UNESCO. (2015). Global citizenship education: Topics and learning objectives.
UNESCO. (2017). Education for sustainable development goals learning objectives.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Veugelers, W. (2019). Teaching democratic values. Education, Citizenship and Social Justice.
Weber, M. (1978). Economy and society. University of California Press.
Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. American Educational Research Journal, 41(2), 237–269.
Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design. ASCD.
Winarno. (2014). Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Bumi Aksara.
Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional. Universitas Terbuka.
Winataputra, U. S. (2015). Materi dan pembelajaran PPKn. Universitas Terbuka.
Young, I. M. (2000). Inclusion and democracy. Oxford University Press.

GLOSARIUM

A

Abduksi	Proses penalaran yang menghubungkan temuan empiris dengan kemungkinan penjelasan konseptual untuk membangun teori.
Abduktif	Bentuk penalaran yang mencari penjelasan paling masuk akal berdasarkan fakta yang ditemukan.
Abstraksi	Proses menyederhanakan fenomena menjadi konsep-konsep utama untuk memudahkan analisis ilmiah.
Akuntabilitas	Kewajiban individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, dan penggunaan kewenangan kepada publik.
Algoritma	Serangkaian prosedur sistematis yang digunakan sistem digital untuk mengolah data dan menghasilkan keputusan atau rekomendasi.
Analisis Kritis	Proses mengevaluasi gagasan secara sistematis berdasarkan argumentasi dan bukti.
Anomie	Kondisi ketika norma sosial kehilangan daya ikat sehingga individu mengalami kebingungan moral dan sosial.
Argumentasi	Penyusunan alasan logis untuk mendukung atau menolak suatu pendapat.

B

Budaya Demokrasi	Pola nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung kehidupan demokratis melalui penghormatan terhadap kebebasan, kesetaraan, dialog, dan tanggung jawab.
Budaya Politik	Orientasi nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap sistem politik serta proses penyelenggaraan pemerintahan.

C

Civic Competence	Kemampuan warga negara yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam

	kehidupan demokratis.
Civic Disposition	Karakter atau watak kewargaan yang tercermin dalam tanggung jawab, toleransi, integritas, kepedulian, dan penghormatan terhadap hukum.
Civic Engagement	Keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi sosial, politik, maupun kemasyarakatan.
Civic Knowledge	Pengetahuan mengenai negara, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, hukum, serta kehidupan kewargaan.
Civic Skills	Kemampuan intelektual dan partisipatif yang memungkinkan warga negara berpikir kritis, berdialog, bekerja sama, dan mengambil keputusan publik.
Citizenship	Keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas politik yang mencakup hak, kewajiban, identitas, dan partisipasi sebagai warga negara.
Civil Society	Ruang kehidupan sosial di luar negara dan pasar yang menjadi wadah partisipasi warga melalui organisasi, komunitas, dan berbagai bentuk asosiasi masyarakat.
Common Good	Kepentingan bersama yang menjadi tujuan kehidupan politik dan penyelenggaraan negara.

D

Democratic Citizenship	Konsep kewargaan yang menekankan partisipasi aktif, penghormatan terhadap hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan demokratis.
Demokrasi	Sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui mekanisme partisipasi, perwakilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak.
Demokrasi Deliberatif	Model demokrasi yang menekankan pengambilan keputusan melalui dialog, argumentasi rasional, dan pertimbangan kepentingan bersama.
Demokrasi Konstitusional	Demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi untuk membatasi kekuasaan sekaligus melindungi hak-hak warga negara.
Dialog Publik	Proses komunikasi terbuka antarwarga untuk membahas persoalan bersama secara rasional.

Digital Citizenship	Kemampuan menggunakan teknologi digital secara etis, bertanggung jawab, aman, dan produktif sebagai warga negara.
Digital Civic Learning	Proses pembelajaran kewargaan yang berlangsung melalui lingkungan digital dan teknologi informasi.
Digital Literacy	Kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab.
Disinformasi	Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dengan tujuan memengaruhi opini atau perilaku publik.

E

Echo Chamber	Kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang memperkuat pandangannya sendiri.
Empati	Kemampuan memahami dan merasakan perspektif atau pengalaman orang lain.
Epistemologi	Cabang filsafat yang mengkaji hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan.
Etika	Cabang filsafat yang membahas nilai, norma, dan prinsip mengenai tindakan yang baik, benar, dan adil.
Etika Publik	Prinsip moral yang mengatur perilaku individu maupun lembaga dalam ruang publik.
Etika Politik	Prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar penggunaan kekuasaan, penyelenggaraan negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara.

F

Filsafat Politik	Cabang filsafat yang mengkaji hakikat negara, kekuasaan, keadilan, kebebasan, legitimasi, dan kehidupan politik.

G

Global Citizenship	Kesadaran sebagai warga dunia yang memiliki tanggung jawab terhadap isu-isu global.
Good Citizen	Warga negara yang menjalankan hak dan

	kewajibannya secara bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan bersama.
Good Governance	Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum.

H

Hak Asasi Manusia (HAM)	Hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial.
Human Dignity (Martabat Manusia)	Nilai yang melekat pada setiap manusia sehingga harus dihormati tanpa diskriminasi.

I

Identitas Nasional	Ciri khas suatu bangsa yang terbentuk melalui sejarah, budaya, bahasa, nilai, dan pengalaman bersama.
Ideologi	Sistem gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ideologi Negara	Sistem nilai fundamental yang menjadi landasan moral, filosofis, dan konstitusional penyelenggaraan negara.
Induktif	Metode penalaran yang bergerak dari fakta atau kasus-kasus khusus menuju penyusunan konsep, prinsip, atau generalisasi yang lebih umum.
Integritas	Keselarasan antara nilai, perkataan, dan tindakan yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi moral.
Interdependensi	Hubungan saling bergantung antarindividu, kelompok, atau negara dalam kehidupan sosial dan politik.

K

Keadaban Publik (Civility)	Sikap saling menghormati dalam interaksi sosial dan politik meskipun terdapat perbedaan pandangan.
Keadilan	Prinsip moral yang menempatkan setiap individu memperoleh hak dan perlakuan secara proporsional dan bermartabat.

Keadilan Sosial	Kondisi ketika seluruh anggota masyarakat memperoleh kesempatan, perlakuan, dan kesejahteraan secara adil.
Kebebasan	Hak individu untuk berpikir, bertindak, dan berpartisipasi sepanjang tidak melanggar hak orang lain dan kepentingan bersama.
Kepemimpinan Etis	Kepemimpinan yang didasarkan pada integritas, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan moral.
Kepentingan Bersama	Tujuan kolektif yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Kewargaan Demokratis	Kondisi ketika warga negara memiliki pengetahuan, karakter, dan kemampuan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.
Komunitarianisme	Pandangan yang menekankan pentingnya komunitas dan nilai-nilai bersama dalam membentuk identitas individu.
Konstitusi	Hukum dasar suatu negara yang mengatur struktur kekuasaan, hak warga negara, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan.
Kontrak Sosial	Konsep filsafat politik yang menjelaskan bahwa negara memperoleh legitimasi melalui persetujuan warga untuk hidup dalam aturan bersama.

L

Legitimasi Politik	Penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah sebagai sesuatu yang sah, adil, dan layak dipatuhi.
Liberalisme	Tradisi pemikiran politik yang menempatkan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara sebagai nilai utama.
Literasi Informasi	Kemampuan menemukan, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara tepat.
Literasi Politik	Kemampuan memahami sistem politik, proses demokrasi, dan isu-isu publik secara kritis.

M

Masyarakat Madani (Civil Society)	Komunitas warga yang mandiri dari negara dan aktif mengembangkan kehidupan demokratis melalui partisipasi sosial.
Metafisika	Cabang filsafat yang membahas hakikat realitas, keberadaan, dan eksistensi.
Moral	Standar nilai mengenai baik dan buruk yang menjadi pedoman tindakan manusia.
Musyawarah	Proses pengambilan keputusan melalui dialog, pertimbangan bersama, dan pencarian mufakat.

N

Nasionalisme	Kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang diwujudkan dalam rasa memiliki, cinta tanah air, dan tanggung jawab terhadap negara.
Negara	Organisasi politik yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan untuk mengatur kehidupan bersama.

O

Ontologi	Cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan atau apa yang dianggap ada.

P

Pancasila	Dasar negara dan ideologi nasional Indonesia yang menjadi landasan filosofis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Paradigma	Kerangka berpikir atau cara pandang yang menjadi dasar memahami suatu fenomena.
Partisipasi Politik	Keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui mekanisme demokrasi.
Pedagogi	Ilmu dan praktik mengenai proses pendidikan, pembelajaran, serta pengembangan peserta didik.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn/PPKn)	Bidang pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, bertanggung jawab, dan berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Pendidikan Politik	Proses pembelajaran yang membantu warga memahami sistem politik, hak, kewajiban, dan

	tanggung jawab sebagai warga negara.
Pendidikan Demokrasi	Proses pendidikan yang mengembangkan nilai, sikap, dan kemampuan hidup dalam masyarakat demokratis.
Pendidikan Karakter	Proses pembentukan nilai moral, integritas, tanggung jawab, dan kebajikan melalui pendidikan.
Pendidikan Pancasila	Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Pluralisme	Pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman identitas, budaya, agama, dan pandangan dalam kehidupan bersama.
Polarisasi Politik	Kondisi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan secara tajam.
Politik Identitas	Praktik politik yang menggunakan identitas kelompok sebagai dasar mobilisasi politik.

R

Rasionalitas	Kemampuan menggunakan akal dan pertimbangan logis dalam mengambil keputusan.
Refleksi	Proses berpikir mendalam untuk memahami pengalaman, nilai, dan tindakan secara kritis.
Republikanisme	Tradisi filsafat politik yang menekankan kebajikan warga, partisipasi publik, dan kepentingan bersama sebagai fondasi kehidupan politik.
Ruang Publik	Arena tempat warga negara berdialog, berpartisipasi, dan membahas kepentingan bersama secara terbuka.

S

Solidaritas Sosial	Ikatan moral yang menghubungkan individu dalam kehidupan bersama melalui rasa saling percaya, kepedulian, dan tanggung jawab.
Supremasi Hukum	Prinsip bahwa seluruh warga negara dan penyelenggara negara tunduk pada hukum yang berlaku.

T

Tanggung Jawab Kewargaan	Kesediaan warga negara menjalankan kewajiban moral, sosial, dan konstitusional demi kepentingan bersama.
Toleransi	Sikap menghormati perbedaan keyakinan, pandangan, budaya, dan identitas dalam kehidupan bersama.
Transparansi	Keterbukaan penyelenggara negara dalam menyediakan informasi dan proses pengambilan keputusan kepada publik.

V

Virtue (Keutamaan)	Kualitas moral yang membentuk karakter baik seseorang, seperti kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan.
Virtue Ethics (Etika Keutamaan)	Pendekatan etika yang menekankan pembentukan karakter dan kebajikan sebagai dasar tindakan moral.

W

Warga Negara	Anggota sah suatu negara yang memiliki hak, kewajiban, identitas, dan tanggung jawab dalam kehidupan politik.

Z

Zoon Politikon	Konsep Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang secara kodrati hidup dalam komunitas politik.

INDEKS

A

Abduksi, 369
Abstraksi, 369
Akuntabilitas, 344, 369, 384
Algoritma, 202, 298, 325, 369
Analisis kritis, 290
Anomie, 369
Aristoteles, 3, 5, 7, 16, 26, 61, 100, 143, 183, 185, 199, 223, 337, 363, 376

B

Bangsa, 166, 341, 363, 383, 384
Budaya sekolah, 131, 217

C

Citizenship, vi, vii, 119, 121, 122, 124, 136, 363, 364, 365, 366, 368, 370, 371, 384
Civic engagement, 115, 303
Civic knowledge, 220

D

Demokrasi, iii, vi, viii, 13, 32, 33, 34, 37, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 79, 82, 85, 88, 91, 102, 103, 105, 107, 110, 112, 113, 119, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 145, 149, 150, 154, 159, 171, 173, 178, 183, 187, 188, 189, 192, 195, 201, 202, 203, 204, 217, 219, 220, 223, 224, 232, 233, 234, 236, 241, 244, 245, 250, 251, 259, 260, 262, 268, 270, 274, 278, 284, 290, 291, 296, 297, 298, 303, 307, 312, 314, 315, 317, 319, 322, 325, 329, 330, 333, 340, 341, 342, 347, 349, 351, 359, 361, 369, 370, 375, 383
Demokrasi deliberatif, 63, 64, 66, 70
Demokrasi digital, 202, 203, 204, 361
Demokrasi Pancasila, 145
Dialog, 103, 106, 194, 197, 353, 370
Digital civic learning, 296, 298
Disinformasi, 68, 293, 371
Diversity, 366

E

Empati, 191, 278, 282, 371
Epistemologi, 371
Etika, iv, vii, viii, 199, 200, 205, 332, 349, 352, 354, 356, 358, 360, 363, 371, 376, 384, 388

F

Filsafat, vii, 371

G

Global citizenship, 368
Good governance, 344

H

Habermas, vi, 50, 53, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 111, 197, 202, 219, 220, 229, 234, 236, 269, 342, 344, 365, 367
Hak, 2, vi, vii, 19, 31, 33, 35, 37, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 70, 75, 98, 108, 144, 148, 153, 154, 186, 325, 329, 368, 372, 373
Hak Asasi Manusia, vi, 108, 148, 153, 368, 372

Hannah Arendt, 52, 56, 59, 61, 68, 101, 150, 338, 340
Hukum, 7, 13, 14, 17, 29, 50, 56, 58, 59, 63, 66, 85, 154, 199, 346, 373, 375, 384

I

Identitas nasional, 40
Ideologi, viii, 345, 372
Induktif, 372
Inquiry, viii, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 299
Institusi politik, 305
Integritas, 192, 200, 372, 383
Interdependensi, 372

J

John Dewey, 75, 78, 82, 85, 88, 91, 98, 110, 113, 129, 149, 155, 189, 215, 218, 224, 226, 244, 260, 277, 285, 306
John Locke, 10, 97, 152
Justice, 364, 367, 368

K

Karakter, vii, 130, 162, 169, 172, 174, 187, 190, 290, 330, 350, 352, 354, 355, 363, 370, 375, 383, 384, 388
Karakter kewargaan, 190, 330, 350, 352, 354
Keadilan, 145, 187, 199, 351, 354, 372, 373, 384
Keadilan sosial, 145, 354
Kebebasan, 18, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 45, 46, 55, 56, 58, 61, 63, 69, 70, 78, 91, 100, 101, 144, 153, 154, 185, 186, 223, 252, 293, 298, 299, 317, 325, 330, 341, 342, 350, 373
Kebijakan publik, 244
Kecerdasan buatan, 323
Kekuasaan, vi, viii, 7, 13, 14, 29, 52, 58, 85, 145, 153, 164, 169, 202, 338, 343, 367
Kemerdekaan, vii, 338
Kepentingan bersama, 370
Kepercayaan publik, 202
Kesadaran hukum, 31
Kesadaran moral, 4
Kesetaraan, 35, 38, 39, 53, 56, 194
Komunitarianisme, 101, 373
Konflik sosial, 86, 190
Konstitusi, vii, 13, 58, 59, 122, 129, 132, 142, 147, 148, 155, 158, 167, 183, 219, 335, 347, 349, 363, 373
Kurikulum, vii, 96, 103, 106, 127, 128, 133, 162, 173, 174, 175, 176, 178, 209, 210, 213, 214, 227, 229, 230, 238, 243, 292, 308, 358, 365, 383

L

Legitimasi, vi, viii, 13, 14, 57, 66, 269, 346, 347, 348, 373
Legitimasi politik, 57, 66, 269
Liberalisme, 373
Literasi digital, 203
Literasi informasi, 298
Literasi politik, 101

M

Manusia, vi, 3, 12, 21, 23, 26, 52, 61, 75, 77, 78, 92, 93, 103, 318, 322, 324, 372
Masyarakat, vi, 6, 12, 14, 17, 23, 28, 44, 50, 62, 67, 86, 92, 110, 113, 114, 196, 198, 219, 222, 347, 374, 383, 384
Media sosial, 62, 65, 68, 197, 202, 222, 270
Metafisika, 374
Moral, vi, viii, 162, 168, 172, 366, 374
Musyawarah, 145, 203, 341, 354, 374

N

Nasionalisme, 342, 347, 350, 374
Negara, iii, vi, vii, viii, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 50, 55, 57, 58, 75, 80, 82, 89, 93, 97, 108, 109, 126, 136, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 157, 158, 161, 166,168, 169, 170, 176, 177, 184, 185, 186, 190, 204, 214, 218, 223, 232, 236, 252, 260, 313, 314, 315, 321, 324, 329, 337, 338, 339, 346, 351, 365, 367, 368, 372, 374, 376, 382, 383, 384
Nilai, 54, 79, 112, 125, 148, 169, 170, 174, 175, 178, 180, 188, 189, 191, 209, 224, 238, 249, 265, 330, 346, 350, 354, 361, 372, 383, 384, 388
Norma, 4, 6, 46

O

Ontologi, 374
Organisasi mahasiswa, 311
Organisasi siswa, 227, 289, 308, 310

P

Pancasila, iv, vii, 126, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 184, 186, 187, 188, 190, 193, 195, 196, 199, 203, 204, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 225, 228, 229, 238, 330, 334, 335, 336, 338, 342, 346, 347, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 365, 366, 374, 375, 382, 383, 384, 388
Paradigma, 365, 368, 374
Partisipasi, iii, vi, viii, 7, 26, 32, 33, 34, 44, 49, 52, 53, 54, 57, 69, 89, 91, 99, 101, 113, 115, 133, 134, 145, 170, 200, 204, 218, 234, 261, 289, 297, 301, 303, 305, 307, 316, 317, 319, 323, 347, 350, 354, 357, 374
Pedagogi, 103, 104, 116, 206, 374
Pemerintahan, 10, 169, 199, 346, 384
Pendidikan karakter, 190, 191, 205
Pendidikan kewarganegaraan, 3, 6, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 31, 34, 40, 43, 63, 84, 85, 86, 158, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 210, 217, 219, 220, 222, 224, 225, 230, 231, 232, 235, 237, 239, 242, 243, 245, 250, 253, 257, 262, 263, 269, 270, 278, 280, 285, 289, 291, 294, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 310, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 368
Pendidikan moral, 86, 232
Pendidikan Pancasila, 142, 172, 360, 382, 384
Pendidikan politik, 76, 84, 86, 87
Pengetahuan kewargaan, 218, 219, 233, 292, 333, 353
Perbedaan, 4, 22, 64, 82, 83, 88, 91, 93, 95, 96, 101, 115, 120, 130, 143, 187, 196, 203, 210, 244, 253, 255, 280, 309, 311, 340, 341, 346
Persatuan, 145, 167, 186, 193, 203, 335, 351, 354, 364
Pluralisme, 172, 375
Politik, iv, vi, viii, 16, 26, 30, 68, 84, 85, 93, 100, 349, 352, 356, 358, 366, 369, 371, 373, 374, 375, 384
Problem Based Learning, 384

R

Rasionalitas, 151, 233, 375
Refleksi, 237, 248, 256, 265, 273, 281, 288, 296, 375
Republikanisme, 375
Ruang digital, 44, 45, 202, 297, 317, 318, 320

Ruang publik, 33, 44, 65, 201, 202, 205
Rule of law, 50, 62

S

Solidaritas, 62, 321, 342, 375

T

Tanggung jawab, 46, 62, 319
Toleransi, vii, 39, 92, 188, 196, 197, 198, 205, 224, 258, 274, 354, 376
Transparansi, 200, 376, 384

U

Undang-Undang Dasar 1945, 172

V

Virtue, vi, vii, 376

W

Warga negara, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 50, 51, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 77, 79, 82, 87, 92, 93, 98, 105, 134, 144, 145, 148, 149, 159, 167, 170, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 195,198, 205, 222, 223, 227, 228, 242, 245, 247, 251, 253, 261, 268, 270, 273, 274, 275, 276, 278, 282, 283, 284, 286, 293, 297, 298, 299, 303, 321, 322, 344, 348, 355, 356, 357, 371

PROFIL PENULIS



Dr. Saryono, S.Pd., M.Pd.
Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara Jakarta.

Penulis lahir di Lampung Timur, 03 April 1986. Mengawali karir sebagai Tukang Kebun (2002-2004), Customer Servis PT. Unitedgrafika Binamandiri (2004-2008), Waiter MM Juice & Restaurant (2008), Operator Produksi di Picture In Design (2008–2009), Staff Administrasi PT. Indomitra Solusindo (2009–2011), Administrasi Produksi PT. Mesa Publishing (2011–2012), Project Leader PT. GRHA Humanindo Manajemen (2012–2013), Tim Perintis dan Pendiri Sekolah Dasar Islam Berbasis Adab – SD Nisrina (2015), Pendidik/Guru (2015–2018), Manajer Pengembangan SDM Yayasan Tadika Puri Jakarta (2018–2019), Manajer Operasional CV. Zona Berkah Konveksi (2019-2021), Dosen tetap Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara (2021-Sekarang).

Pendidikan: SDN 02 Tajung Aji Lulus tahun 2000, SLTP Negeri 1 Labuhan Maringgai (2000-2002/Tidak Selesai), Paket B/SLTP PKBM Al-Munir Jakarta Lulus tahun 2003, Paket C/SLTA PKBM Al-Munir Jakarta Lulus tahun 2005, Strata 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Kusuma Negara Jakarta Lulus tahun 2015, Strata 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP Arrahmaniyah Depok Lulus tahun 2019, Strata 3

Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta Lulus tahun 2026.

Organisasi: Ketua Departemen Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Kusuma Negara (2010), Ketua Departemen Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Kusuma Negara (2011), Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Kusuma Negara (2012), Ketua Departemen PSDM Forum Dakwah dan Studi Islam (FORDASI) STKIP Kusuma Negara (2013), Kordinator Wilayah Jakarta Timur Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) Jakarta (2013), Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Pemuda Peduli Pendidikan Dan Sosial (2014), Wakil Ketua Masyarakat Pencinta Pendidikan Indonesia (MP2I) Jakarta (2017), Ketua Ikatan Persaudaraan Alumni (IKPAL) Prodi PPKn STKIP Kusuma Negara Jakarta (2018), Founder dan Pembina Komunitas Pendidikan dan Sosial Bhumi Muda Mandiri (KuMMaN) Bogor (2016-Sekarang), Pengurus Bidang Kurikulum Asosiasi Profesi Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Wilayah DKI Jakarta (2022-2027), Pengurus Bidang Publikasi Asosiasi Dosen Pancasila dan kewarganegaraan – ADPK Nasional (2023-Sekarang).

Penulis Buku: Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2023), Memperkuat Sinergitas Untuk Membentuk Generasi Unggul, Cerdas dan Berkarakter (2023), Membangun Tatanan Kebangsaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal (2024), Membentuk Perilaku Anti Korupsi Melalui Pengembangan Media Buku Saku Pembisaan Nilai Budaya Berbasis Pola Asuh Orang Tua (2024), Bunga Rampai Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal (2024), Perencanaan Pembelajaran dan Penulisan Karya Ilmiah: Pemikiran Ilmiah (2024), Jejak Integritas: Menapaki Jalan Kehormatan Menuju Hidup Bermakna (2025), Panduan Praktis E-Commerce: Strategi Membangun, Mengelola, Mengembangkan Usaha Digital Untuk UMKM dan Pemula (2025), Manajemen Sekolah: Konsep, Teori dan Strategi (2026), Pengantar Pendidikan: Landasan, Kurikulum, dan Perkembangan Pendidikan (2026), Pengembangan Media Pembelajaran PPKn Berbasis Inovasi untuk Membangun Civic Culture (2026).

Hibah Penelitian: *Research Group Institusi:* Konsep Dasar Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Analisis Pustaka dan Implikasinya Pada Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia (2024).

Hibah Pengabdian: *Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional*: Pemberdayaan UMKM Berbasis Pesantren: Strategi Branding dan Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kripik (2025).

Publikasi Artikel: Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa (2022), Strategi Pengolahan Sampah Dan Penerapan Zero Waste di Lingkungan Kampus STKIP Kusuma Negara (2022), Sikap Politik dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina (2022), Learning Outcomes of Pancasila and Citizenship Education Through the Problem Based Learning Model (2022), Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi Virtues (2022), Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua (2023), Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri 14 Jakarta (2023), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan Literasi Digital Bagi Kader PKK & POSYANDU (2023), Konsep Dasar Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (2024), Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digitalisasi 5.0: Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Dasar (2024), Landasan Filosofis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (2024), The Role of the Tri Pusat Pendidikan in Combating Cyberbullying in Adolescents (2024), Pemberdayaan UMKM Berbasis Pesantren: Strategi Branding dan Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Keripik (2025), Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat (2025), Analisis Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Ilmu Negara (2025), Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan (2025), Strategi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler (2025), Relevansi Nilai-nilai Pancasila dalam Mengasah Kritisisme Masyarakat Modern (2025), Membangun keberanian melapor sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual (2025), Pemberdayaan Anggota DPRD Dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Propinsi Jawa Tengah (2025), Pendidikan Politik Kaum Milenial di Era Digital: Peluang, Tantangan, dan Strategi Penguatan Literasi(2025), Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Indonesia (2025), Education Management in Early Childhood Education: Curriculum Governance, Human Resources, Financing, and Quality Development (2026), Catcalling sebagai Praktik Kontrol Sosial Maskulin di Ruang Publik Kampus: Studi Fenomenologi pada Mahasiswi FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2026), Penguatan Karakter Cinta Tanah Air Melalui Ekstrakurikuler Paskibra di Sekolah Menengah Pertama (2026),

Implementasi Fungsi POAC dalam Manajemen Pendidikan Kewarganegaraan pada Enam Program Studi di STKIP Kusuma Negara Jakarta (2026), Political Ethics Education and Student Political Culture: Legal Awareness as a Predictor of Democratic Participation among University Students (2026).

Kontak penulis melalui e-mail: saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id



A. Identitas Diri

Nama Lengkap	: Sri Rahayu Pudjiastuti
Tempat Tanggal Lahir	: Bali, 28 Juni 1964
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Anyelir No.53. Komplek Hankan Rt.07/02. Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis Depok
No. HP/WA	: 08129959122
Institusi	: Program Magister PPKn STKIP Arrahmaniyah
Email	: srirahayu@stkip-arrahmaniyah.ac.id
ID Orchid	: 0000-0001-7124-3024
ID Scopus	: 57216922817
ID Shinta	: 6134432
NIRA	: 231110431111088933305

B. Pendidikan

S1 - 1989	Jurusan PPKn	IKIP Jakarta
S2 - 1998	Program Studi PKLH	IKIP Jakarta
S3 - 2002	Program Studi PKLH	Universitas Negeri Jakarta

C. Bidang Keahlian

1) Pendidikan Lingkungan Hidup
2) Ekological Chitizenship

D. Perolehan Hibah Penelitian

1) Hibah Fundamental Penelitian Kompetitif Nasioanl (PFR) pada tahun pertama 2025 dan lanjut tahun kedua 2026 sebagai ketua peneliti dengan judul: Potensi Fitoremediasi Limbah Surfaktan Akibat Calotropis gigantea, Asystasia gangetica, dan Phyllanthus urinaria pada Ekosistem Perairan Tercemar di Wilayah Urban.
2) Hibah Fundamental Penelitian Kompetitif Nasioanl (PFR) pada tahun pertama 2025 dan lanjut tahun kedua 2026 sebagai anggota peneliti dengan judul: BioInvaso Meter: Formulasi Indeks Keterancaman Ekosistem Berbasis Dominansi dan Agresivitas Ikan Invasif sebagai Early Warning System.

E. *Reasearch Grant*

1) scopus "Utilization of Forest Natural Resource Potentials, Especially Wood, to Realize Independence of Regional Development, JARDCS.Journal of Advanced Reseacrh in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. Scope of JARDS 2020. Q3. Volume 12 Issue 2 Pages 1720-1724"

2) Scopus Q4. Integrasi Spiritualitas Islam, Ketahanan Kesehatan Mental, dan Keberhasilan Pendidikan. Tahun 2024.

3) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Hutan, khususnya kayu, untuk mewujudkan kemandirian pembangunan Daerah tahun 2020.

4) **Scopus** Q1 **"**Ecohydrology and phytoremediation model for urban water management using asystasia gangetica and the ebtropy weight method". Discover Sustainability https:/link.springer.com/article/10.1007/s43621-026-04579-7. 2 September 2026.

5) Scopus Q2 Sinta 1 **"**Comparative phytoremediation efficiency of calotropis gigantea, asystasia gangetica, and Phyllanthus urinaria in surfactant-contaminated waters" Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. September 2026

F. Publikasi Buku

1) Penelitian Pendidikan (2019) penerbit Media Akademi Yogyakarta, 378 halaman. ISBN: 978-602-5584-51-0.
2) LEBAH: Inspirasi dan Ilustrasi Kehidupan Karakter Lebah Menurut Al-Qur'an (2020) Penerbit Gemala. 118 halaman. ISBN: 978-623-7754-13-8.
3) Etika Lingkungan,(2020). Penerbit Gemala . 225 halaman. ISBN: 978-623-7754-18-3.
4) Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup (2025) penerbit Widina. 117 halaman ISBN: 978-623-500-864-6
5) Etika Islam dalam menjaga lingkungan hidup (2025) ISBN 978 623 500 864 6 jumlah halaman 117. Penerbit Widina Bandung.
6) Fitoremediasi sebagai teknologi ramah lingkungan konsep dan implementasi (2025) ISBN: 9786342464342. Penerbit Widina Bandung.
7) Pemanfaatan BioInvasometer dalam kajian biologi konservasi (2025) ISBN: 9786342465233. Penerbit Widina Bandung.
8) Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital. (2025) ISBN: 978-634-246-130-3. Widina Media Utama
9) Merajut Kebangsaan: Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dayak Dalam Membangun Identitas Nasional(2026) ISBN: 978 634 246 339. Widina Media Utama.
10) Inovasi Pembelajaran PPKn (2026) ISBN: 978-634-246-966-8. Widina Media Utama
11) Dasar-Dasar Mikrobiologi: Konsep, Struktur, dan Aplikasi dalam Kehidupan (2026). ISBN: 786347663870. Dunia Penerbitan Buku.
12) Merajut Kearifan Lokal dalam Kewarganegaraan Ekologis (2026) ISBN: 786347849021. Dunia Penerbitan Buku.

G. Organisai Profesi & Sosial

1) Sekretaris Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) tahun 2015-2020. Tahun 2020-2025. Tahun 2025- Sekarang.
2) Dewan Pembina Komnas Anak DKI Jakarta 2020-2025. 2025-2030.
3) Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda 1989 sampai sekarang.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Etika Politik Sebagai Fondasi Kewarganegaraan Demokratis

Buku ini lahir dari sebuah pertanyaan yang terus mengikuti penulis sepanjang perjalanan sebagai pendidik, mengapa pengetahuan tentang kewarganegaraan tidak selalu melahirkan kebijaksanaan dalam berkewargaan? Pertanyaan itu tidak muncul dari ruang seminar atau perdebatan akademik semata, melainkan tumbuh perlahan melalui pengalaman mengajar, berdialog dengan mahasiswa, mengamati dinamika masyarakat, serta menyaksikan perubahan cara manusia berinteraksi di ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Di ruang kelas, mahasiswa mampu menjelaskan demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, dan negara hukum dengan baik. Namun di luar kelas, perbedaan pendapat sering berubah menjadi permusuhan, kebebasan berbicara kerap kehilangan tanggung jawab, dan percakapan publik semakin miskin empati. Dari situlah muncul kesadaran bahwa persoalan kewargaan tidak cukup dijawab hanya dengan menambah pengetahuan, tetapi memerlukan pendalaman mengenai bagaimana manusia belajar hidup bersama.

Kesadaran tersebut membawa penulis pada keyakinan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada negara. Negara memang menjadi ruang tempat kewargaan dijalankan, tetapi kewargaan sendiri berakar pada relasi antarmanusia. Sebelum seseorang menjadi warga negara dalam pengertian konstitusional, ia terlebih dahulu adalah manusia yang hidup bersama manusia lain. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya bukan sekadar pendidikan mengenai institusi politik, melainkan pendidikan yang membantu manusia memahami makna kebebasan, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan kehidupan bersama.

Perkembangan masyarakat kontemporer semakin memperlihatkan bahwa tantangan kewargaan tidak lagi semata-mata bersifat politik atau hukum, melainkan juga moral dan kultural. Kemajuan teknologi menghadirkan ruang publik yang semakin terbuka, tetapi tidak selalu diikuti oleh kemampuan berdialog. Informasi tersedia tanpa batas, tetapi tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Partisipasi menjadi semakin mudah, sementara refleksi justru sering tertinggal. Demokrasi menghadapi berbagai tantangan baru, seperti polarisasi, disinformasi, politik identitas, menurunnya kepercayaan publik, hingga kecenderungan melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai kekayaan kehidupan demokratis. Dalam konteks inilah Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk terus memperbarui orientasi dan cara pandangnya.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Pendidikan & Metodelogi Penelitian

ISBN 978-634-317-246-8

9 786343 172468